

---

## DAMPAK PEMBANGUNAN PERUMAHAN WAIWATOLOLONG PERMAI TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT LOKAL (Studi Kasus Desa Lamawalang Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur)

Oleh

Adrianus Kuda Hera

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas  
Nusa Cendana Kupang

Email: [heraadrianus@gmail.com](mailto:heraadrianus@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 22-10-2025

Revised: 12-11-2025

Accepted: 25-11-2025

### Keywords:

Pembangunan Perumahan,  
Dampak Sosial Ekonomi,  
Lingkungan, Mixed Method,  
Flores Timur

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Perumahan Waiwatololong Permai terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal di Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan mixed method (metode campuran) yang bersifat deskriptif. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, penyebaran kuesioner, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Perumahan Waiwatololong Permai memberikan dampak positif terhadap masyarakat, antara lain meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, bertambahnya peluang ekonomi baru, dan naiknya nilai lahan di sekitar kawasan perumahan. Dari aspek sosial, interaksi antara warga lokal dan penghuni baru semakin meningkat meskipun partisipasi sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan. Namun, dari aspek lingkungan masih ditemukan kendala seperti pengelolaan limbah yang belum optimal dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Secara keseluruhan, pembangunan perumahan ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun diperlukan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur menjadi semakin penting perannya dalam pembangunan. Sebagai contoh, percepatan pertumbuhan ekonomi atau revitalisasi pertanian jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Selain itu, pengentasan keluarga miskin dan permasalahan kualitas lingkungan hidup tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur. Dalam prosesnya, walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik ditingkat nasional maupun antar daerah (Sumirat, 2019)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN, 2025-2029) pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas nasional. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan konektivitas dan ketahanan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan sektor perumahan. Penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik menjadi faktor utama dalam mendorong pembangunan perumahan yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. penyediaan infrastruktur juga membantu masyarakat maupun negara dalam mengelola perekonomian negara.

Integrasi pembangunan perumahan dengan kawasan perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. Dengan strategi tersebut, diharapkan terjadi sinergi antara pembangunan infrastruktur dan sektor perumahan dalam menciptakan kawasan pemukiman yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi lokal. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat peran sektor swasta dalam penyediaan perumahan melalui insentif investasi, kemudahan perizinan, serta skema pembiayaan yang lebih merata, (Hartono, 2011). Melalui langkah-langkah ini, pembangunan perumahan diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas, mengurangi *backlog* perumahan, serta berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sektor perumahan menjadi isu strategis dalam pembangunan karena merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Keberadaan rumah yang layak memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ketersediaan hunian yang layak menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Makna utama dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta memperbaiki regulasi agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. Dalam masyarakat modern, rumah menjadi simbol stabilitas dan kekayaan sebuah keluarga. Pentingnya peran rumah diakui dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H yang mengamanatkan kebutuhan bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak dasar yang harus dipenuhi.

Kontribusi sektor perumahan terhadap perekonomian juga dapat dilihat dari dampak yang diberikan kepada sektor-sektor lain. Sektor yang diuntungkan di antaranya adalah sektor konstruksi (Hartono, 2011). Berkembangnya sektor perumahan menuntut dibangunnya akses jalan ataupun sarana atau prasarana lain yang mendukung. Berkembangnya sektor perumahan juga mengakibatkan peningkatan pada kawasan perdagangan dan jasa. Kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, kebutuhan sekunder serta kebutuhan *tersier* membuat hal tersebut harus dipenuhi sehingga makin banyak penyedia jasa serta pedagang yang menyediakan kebutuhan tersebut. Kontribusi sektor perumahan terhadap perekonomian juga dapat dilihat dari dampak yang diberikan kepada sektor-sektor lain.

Kota dan masyarakat mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan kota secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang ada didalamnya. Perkembangan kebutuhan dan pola hidup masyarakat kota dapat memacu pertumbuhan fisik kota (Putriningtyas, 2018). Kota yang berperan sebagai pusat pelayanan yang mendukung aktivitas penduduknya akan selalu mengalami perkembangan. Perkembangan kota tidak selamanya sesuai dengan daya dukung yang ada. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi terhadap tingginya tekanan pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama penyediaan kawasan hunian.

Kebutuhan akan kawasan hunian mengakibatkan para pengembang perumahan melakukan perluasan pembangunan perumahan ke pinggiran kota yang konsumen utamanya adalah masyarakat kota. Pembangunan perumahan yang terjadi di pinggiran kota ini bisa memberikan dampak pada berbagai aspek, seperti aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi masyarakat sekitar yang sudah bermukim sebelum adanya pembangunan perumahan. Dampak yang terjadi pada aspek ekonomi yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan peluang pekerjaan, perubahan mata pencaharian, peningkatan pemanfaatan perumahan sebagai tempat usaha (Pratama, 2020). Dekatnya lokasi perumahan dengan permukiman desa tidak hanya memberikan dampak pada aspek ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Interaksi antara penduduk asli dengan pendatang dari kawasan perumahan baru dapat mempengaruhi pola kehidupan sosial, seperti perubahan dalam nilai-nilai budaya, gaya hidup, serta pola komunikasi antarwarga. Selain itu, keberadaan perumahan baru juga dapat mendorong peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur di desa, seperti akses jalan, sekolah, dan pusat perbelanjaan, yang secara tidak langsung mengubah dinamika kehidupan masyarakat setempat.

Masyarakat yang terdampak pembangunan perumahan cenderung memiliki gaya hidup yang hedonis dan materialis (Erin, 2015). Selain itu pembangunan perumahan pada umumnya membawa dampak positif karena memicu terjadinya kenaikan harga properti (tanah dan rumah), serta peningkatan jumlah sarana dan prasarana, namun pembangunan perumahan yang tidak terintegrasi dengan permukiman lokal dalam aspek drainase dapat menyebabkan terjadinya banjir bagi permukiman lokal (Sukarsa, 2014).

Kabupaten Flores Timur, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu kabupaten kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar. Menghadapi berbagai tantangan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 11,25%, menunjukkan peningkatan dari 9,66% pada tahun 2015. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini masih mencerminkan tingkat kemiskinan yang signifikan. Sebagian besar penduduk Flores Timur menggantungkan hidup pada sektor pertanian subsisten dan perikanan tradisional, yang rentan terhadap fluktuasi cuaca dan harga pasar. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar turut memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Perda ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Sejalan dengan hal tersebut menyebabkan banyaknya pengembang perumahan (*developer real estate*) masuk ke Kecamatan Larantuka untuk melakukan pembangunan perumahan.

Dalam konteks perumahan, Kabupaten Flores Timur menghadapi tantangan serius terkait permukiman kumuh. Berdasarkan SK Bupati Flores Timur Nomor 110 Tahun 2015, luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten ini mencapai 50,59 hektar, tersebar di beberapa wilayah seperti Amagarapati, Postoh, Ekasapta, dan Sarotari. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya mereka yang tergolong dalam kelompok berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, pembangunan perumahan yang mulai meningkat di beberapa wilayah, termasuk Desa Lamawalang, menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau tata ruang, tetapi juga memengaruhi struktur sosial masyarakat, pola ekonomi lokal, dan kondisi lingkungan. Misalnya, perubahan penggunaan lahan, pergeseran relasi sosial antarwarga, hingga potensi konflik atas tanah adat dan sumber daya lokal menjadi isu-isu yang relevan untuk dikaji secara mendalam.

Salah satu inisiatif pembangunan perumahan yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut adalah Perumahan Waiwatolong Permai. Perumahan ini merupakan proyek milik swasta yang dikembangkan oleh PT Pembangunan Mandiri Sejahtera, sebuah perusahaan yang secara komersial memang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan unit-unit perumahan. Namun, di balik orientasi bisnis tersebut, perumahan ini juga memiliki misi sosial, yakni menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Meskipun dibangun oleh pihak swasta, proyek ini juga sejalan dengan program subsidi perumahan dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan terjangkau. Artinya, eksekusi teknis dan pengembangan di lapangan dilakukan oleh perusahaan swasta, namun tetap dalam koridor kebijakan subsidi pemerintah yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, Perumahan Waiwatolong Permai tidak hanya menjadi sarana bisnis semata, melainkan juga merupakan upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan harga yang jauh dari kata mahal, sebagai bagian dari solusi atas permasalahan permukiman kumuh di Flores Timur.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, telah mengkaji dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat lokal dari tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak positif lebih dominan dirasakan dalam aspek sosial, seperti peningkatan kualitas hubungan sosial dan kegiatan sosial masyarakat, sementara pada aspek ekonomi dan lingkungan, dampak positif belum dirasakan secara signifikan.

Meskipun memberikan gambaran awal yang penting, penelitian tersebut masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, fokus penelitian berada pada kawasan urban fringe, sehingga belum menjawab bagaimana dinamika pembangunan perumahan

terjadi di wilayah non-perkotaan, seperti Kabupaten Flores Timur, yang memiliki karakteristik geografis, sosial budaya, dan ekonomi yang berbeda secara signifikan. Kedua, pendekatan yang digunakan cenderung menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara umum, tanpa menggali secara mendalam narasi masyarakat mengenai perubahan sosial dan ekonomi yang mereka alami. Aspek persepsi masyarakat lokal, pengalaman adaptif, serta respon terhadap pembangunan masih kurang tergambarkan secara utuh.

Ketiga, penelitian terdahulu belum banyak membahas keterkaitan antara pembangunan perumahan dengan keberlanjutan lingkungan, seperti perubahan fungsi lahan, tekanan terhadap sumber daya alam, dan potensi degradasi lingkungan, padahal aspek ini sangat penting, terutama di wilayah-wilayah yang masih memiliki kerentanan ekologis tinggi seperti Flores Timur. Keempat, masih minim kajian yang melihat fenomena pembangunan perumahan di daerah berkembang atau tertinggal, padahal wilayah-wilayah ini juga mulai mengalami tekanan pembangunan dan urbanisasi yang berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan, masih kurang diulas, sehingga tidak diketahui sejauh mana masyarakat lokal memiliki kontrol atau suara dalam proses pembangunan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam dampak pembangunan perumahan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lokal di Kabupaten Flores Timur melalui pendekatan kualitatif yang partisipatif dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang tidak hanya memperkaya literatur pembangunan perumahan di Indonesia, tetapi juga menjadi dasar kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi wilayah-wilayah berkembang di Indonesia Timur.

Dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang masih rentan dan mulai tumbuhnya aktivitas pembangunan perumahan di kawasan ini, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial, Ekonomi, Masyarakat Lokal (Studi Kasus Desa Lamawalang Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pembangunan perumahan memengaruhi kehidupan masyarakat lokal dan menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian mixed method (metode campuran) dengan desain studi kasus. Pendekatan ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak pembangunan Perumahan Waiwatololong Permai di Desa Lamawalang, Kabupaten Flores Timur.

Secara kuantitatif, penelitian menganalisis data terkait perubahan kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pembangunan perumahan. Secara kualitatif, penelitian menggali pandangan dan pengalaman masyarakat mengenai perubahan tersebut. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan pendekatan analisis yang didasarkan pada logika dengan memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) (Fatimah, 2020). Analisis SWOT juga merupakan sarana bantu bagi perencana strategi guna memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan penggunaan analisis SWOT dalam pembangunan perumahan di Desa Lamawalang adalah untuk mengidentifikasi secara sistematis dampak strategis dari pembangunan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi desa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana kekuatan internal (seperti peningkatan kualitas ruang dan interaksi sosial), kelemahan struktural (misalnya belum optimalnya pengelolaan limbah atau partisipasi sosial), peluang eksternal (seperti pertumbuhan penduduk dan potensi peningkatan PAD), serta ancaman jangka panjang (seperti konflik sosial atau degradasi lingkungan) (Fatimah, 2020).

Metode SWOT yang dilengkapi skoring dan pembobotan menggunakan skala Likert, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan dasar kuantitatif untuk menentukan posisi strategi pembangunan. Ini memungkinkan perumusan kebijakan yang tepat, seperti integrasi penduduk baru, penataan ruang partisipatif, atau diversifikasi sektor ekonomi. Analisis ini berfungsi sebagai alat evaluatif dan perencanaan strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial spasial di Desa Lamawalang.

Dalam penelitian pembangunan perumahan di Desa Lamawalang, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, warga lokal, penghuni perumahan baru, serta dinas terkait. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi kualitatif yang bersifat deskriptif dan kontekstual terkait persepsi, pengalaman, serta pandangan mereka terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pembangunan perumahan. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya berdasarkan indikator yang relevan dalam analisis SWOT.

Analisis data kualitatif diolah lebih lanjut dengan metode kuantitatif melalui teknik skoring Skala Likert untuk mendapatkan nilai bobot numerik. Setiap elemen informasi atau pernyataan dari informan dikelompokkan berdasarkan faktor SWOT (*Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, *Threats*), dan selanjutnya diberikan skor 1 sampai 5. Skoring ini bertujuan untuk mengukur signifikansi (tingkat kekuatan/peluang) atau dampak negatif (tingkat kelemahan/ancaman) yang diwakili oleh masing-masing faktor. Skor mencerminkan intensitas atau kondisi aktual dari suatu indikator, sementara bobot ditentukan berdasarkan tingkat urgensi atau kepentingan strategis tiap faktor. Nilai akhir dari setiap indikator diperoleh dari perkalian skor dan bobot, yang kemudian digunakan untuk menghitung posisi strategi dalam diagram SWOT kuadran. Teknik ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta memperkuat validitas analisis secara akademik dan aplikatif.

Berdasarkan analisis SWOT penulis membuat perhitungan yang dilakukan melalui empat tahap, yaitu:

- 1) Melakukan penentuan skor (a) dan bobot (b) poin potensi.
- 2) Melakukan perhitungan jumlah total perkalian skor dan bobot ( $c = a \times b$ ) pada setiap faktor S-W-O-T.
- 3) Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); perolehan angka ( $d = x$ ) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka ( $e = y$ ) menjadi nilai atau titik pada sumbu Y.
- 4) Mencari *positioning* yang ditunjukkan oleh titik (x, y) pada diagram SWOT

## Pembahasan

Pembangunan kompleks perumahan di Desa Lamawalang telah memicu transformasi multidimensi yang memengaruhi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan termasuk kepala desa, tokoh masyarakat, warga lokal, penghuni kompleks, pengembang, dan dinas terkait, dapat disimpulkan bahwa dampak pembangunan ini bersifat kompleks, dengan dinamika positif dan tantangan yang perlu diantisipasi secara strategis.

### 1. Dampak terhadap Lingkungan

Pembangunan Perumahan Waiwatolong Permai di Desa Lamawalang menimbulkan dinamika lingkungan yang kompleks, dengan keselarasan internal serta kerentanan tata kelola eksternal. Dari hasil wawancara, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa proyek ini tidak menimbulkan gangguan lingkungan fisik yang signifikan, karena pembangunan tidak termasuk aktivitas penghasil limbah berbahaya. Lingkungan perumahan dalam kompleks dinilai sangat baik dan nyaman, didukung infrastruktur dasar seperti jalan yang disemenisasi dan akses air bersih yang stabil melalui sumur bor khusus.

Sistem pengelolaan lingkungan sudah dirancang dengan baik, termasuk saluran air dan parit, serta tidak terdapat perilaku membuang sampah sembarangan. Lahan yang digunakan sebelumnya hanya untuk konsumsi rumah tangga, bukan pertanian luas, sehingga pembangunan berlangsung tanpa konflik lahan. Pengembang, PT. Pembangunan Mandiri Sejahtera, berkomitmen melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala, mencakup pengendalian limbah, kualitas air, udara, dan gangguan selama pembangunan.

Namun, dari Pemerintah Desa menyoroti kelemahan utama pada pengelolaan sampah yang belum terintegrasi. Saat ini, dengan 22 Kepala Keluarga (KK) baru, sampah masih dikelola secara mandiri, termasuk pembakaran sampah rumah tangga di rumah masing-masing. Pemerintah Desa belum menemukan tempat pengelolaan sampah atau lokasi pembuangan akhir di lokasi perumahan, berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan gangguan kesehatan jika jumlah penghuni bertambah.

Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan dampak lingkungan, khususnya terkait dokumen SPPL dan UKL-UPL. Namun, ia menyatakan koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga pengawasan lingkungan terhadap pembangunan belum maksimal. Hal ini diperkuat oleh narasumber dari Dinas Perumahan, yang menyebut dinas hanya bergantung pada dokumen perizinan dan mengakui minimnya pemantauan lingkungan, sehingga risiko terjadi degradasi lingkungan jangka panjang.

Menurut Otto Soemarwoto dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua makhluk hidup, benda, dan kondisi yang memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia. Pembangunan tanpa pengelolaan limbah dan drainase yang baik dapat menurunkan kualitas lingkungan, misalnya melalui pencemaran air dan tanah, peningkatan risiko banjir, serta berkurangnya kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan Brundtland (1987), pembangunan Perumahan Waiwatololong Permai harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang, melalui prinsip efisiensi lahan, konservasi sumber daya, pengelolaan limbah terpadu, dan pelestarian ekosistem, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menjaga keseimbangan ekologis jangka panjang.

Di sisi lain, keberadaan perumahan membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha yang melayani kebutuhan penghuni dan warga sekitar, sesuai master plan 145 unit rumah. Dari perspektif sosial-lingkungan, pembangunan mengubah kawasan hutan yang sepi menjadi lingkungan aman dan ramai. Tokoh masyarakat menginformasikan bahwa developer telah menyediakan rencana setplan yang meliputi bak sampah, ruang terbuka hijau, dan taman hiburan. Meski fasilitas ini belum sepenuhnya terwujud karena pembangunan masih berlangsung, hal ini memberikan optimisme terhadap perbaikan lingkungan di masa depan melalui edukasi dan kolaborasi. Namun, perbaikan ini dapat terhambat jika Pemerintah Desa tidak melakukan pendekatan aktif untuk mengintegrasikan warga baru dalam kegiatan desa, termasuk lingkungan.

Tantangan utama pembangunan Perumahan Waiwatololong Permai terletak pada pengelolaan sampah, limbah, dan drainase yang belum optimal, serta penyediaan ruang terbuka hijau yang adaptif terhadap perubahan tata guna lahan. Sistem yang masih bersifat mandiri dan kurang terkoordinasi antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat perlu diperbaiki agar degradasi ekologis dan penurunan kualitas hidup tidak menjadi ancaman di masa mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang terpadu, efisien, berkelanjutan, sekaligus mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat lokal.

## 2. Dampak terhadap Sosial

Pembangunan Perumahan Waiwatololong Permai di Desa Lamawalang telah menjadi katalisator gangguan sosial yang signifikan, memicu dinamika baru yang kompleks namun terkelola dengan baik. Dalam kerangka teori fungsionalisme Emile Durkheim, Perubahan sosial ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah proses transisi dari masyarakat dengan solidaritas mekanik (homogen dan berbasis kesamaan) menuju masyarakat yang lebih beragam dan saling bergantung dengan solidaritas organik. Kehadiran penduduk baru dengan latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan budaya yang heterogen telah mendorong proses adaptasi terhadap norma dan nilai sosial baru, yang unik, berlangsung tanpa menimbulkan konflik serius, melainkan melalui pembentukan norma sosial yang segera diterima bersama, kebersamaan ini yang menunjukkan adanya interaksi sosial yang harmonis antara penduduk lama dengan

penduduk baru, yang mendandakan terciptanya kehidupan sosial bermasyarakat yang aman, tentram, dan berhasil.

Keberhasilan integrasi sosial awal ini didukung oleh modalitas sosial yang kuat dari kedua belah pihak. Dampak positif yang nyata terlihat dari interaksi harmonis yang terjalin melalui berbagai kegiatan bersama. Penduduk baru menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan desa, seperti juga dalam doa Rosario di Kelompok Basis Gereja (KBG), menunjukkan upaya nyata untuk menyatu dengan tradisi dan kehidupan spiritual warga lama. Solidaritas ini meluas ke bentuk bantuan fisik dan material, di mana penduduk baru menyumbangkan dana dan tenaga dalam pembangunan gereja desa, yang mengindikasikan rasa memiliki terhadap fasilitas umum. Selain itu, mereka terlibat rutin dalam kegiatan sosial seperti gotong royong membersihkan lingkungan, sebuah aktivitas yang secara efektif mempererat hubungan dan menghilangkan jarak sosial. Sikap terbuka dan hangat dari masyarakat lama yang secara proaktif mengajak dan melibatkan warga baru dalam setiap kegiatan desa menjadi modal penting yang menjamin proses integrasi ini berlangsung tanpa hambatan. Kehadiran masyarakat baru juga memperluas jaringan sosial, mendorong masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan, dan membuka peluang interaksi melalui sektor pendidikan dan kesehatan, sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan resmi desa seperti Musrenbang dan pemilihan ketua RT, yang menyatakan bahwa mekanisme pengendalian potensi konflik berjalan efektif.

Meskipun demikian, terdapat tantangan struktural dan geografis yang berpotensi menghambat optimalisasi integrasi sosial di masa mendatang. Tantangan pertama adalah segregasi administratif, di mana sebagian penghuni kompleks belum tercatat secara resmi sebagai penduduk desa. Kondisi ini secara yuridis membatasi keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial formal dan akses terhadap layanan publik. Tantangan kedua adalah hambatan geografis, yaitu jarak fisik yang relatif jauh antara kompleks perumahan dan pusat aktivitas desa. Jarak ini mengurangi peluang terjadinya interaksi spontan dan intensitas pertemuan di luar kegiatan yang terencana, padahal interaksi spontan sangat esensial untuk membangun keakraban sosial yang lebih dalam. Jika tantangan administratif dan geografis ini tidak dapat diatasi melalui strategi komunikasi, pelibatan aktif, dan kegiatan integratif yang berkelanjutan dari pemerintah desa dan pengembang, potensi segregasi sosial antara warga lama dan penduduk baru dapat meningkat di masa mendatang, menyebabkan menurunnya intensitas interaksi di luar kompleks dan menghambat manfaat sosial pembangunan yang merata.

### **3. Dampak terhadap Ekonomi**

Pembangunan Perumahan Waiwatololong Permai telah terbukti menjadi motor penggerak stimulus perekonomian yang sangat signifikan di Desa Lamawalang, memicu dinamika pertumbuhan lokal yang diwujudkan oleh manfaat nyata namun sekaligus membawa tantangan struktural. Secara fundamental, proyek ini mengkonfirmasi prinsip Teori Keynesian, di mana investasi swasta dalam sektor perumahan berhasil merangsang aktivitas ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Kehadiran pendatang baru dan aktivitas pembangunan yang masif menciptakan permintaan agregat yang besar terhadap barang dan jasa lokal. Kehadiran pendatang baru menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa, yang mendorong tumbuhnya usaha mikro seperti warung sembako, penjual minyak tanah, dan jasa informal lainnya. Warga sekitar menyatakan

bahwa penghasilan mereka meningkat karena adanya konsumen baru dari kompleks perumahan. Pembangunan perumahan memberikan peluang kerja bagi warga lokal selama proses konstruksi dan mendorong pertumbuhan usaha kecil di sekitar kompleks perumahan. Dampak ini sangat terlihat dari menjamurnya usaha mikro dan kecil (UMK) yang sebelumnya tidak ada, seperti warung sembako, layanan perbaikan alat elektronik, dan bahkan munculnya kafe baru yang menandai terciptanya pasar rekreasi baru. Warga sekitar secara langsung merasakan peningkatan pendapatan karena adanya basis konsumen baru dari kompleks perumahan, sementara UMK ini juga membuka lapangan kerja bagi warga desa, baik sebagai pemilik usaha, karyawan, maupun tenaga musiman selama proses konstruksi.

Secara makro-fiskal, pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh perumahan memberikan dampak afirmasi fiskal yang besar pada struktur pendapatan desa. Peningkatan data kependudukan menjadi dasar penting dalam perhitungan alokasi Dana Desa, yang otomatis berpotensi meningkat. Pemerintah desa melihat peluang ini sebagai modal finansial yang penting untuk memperluas layanan publik dan meningkatkan investasi pada infrastruktur dasar. Hal ini sejalan dengan Teori Pembangunan Ekonomi Lokal (Rodriguez-Pose & Tijmstra, 2005), yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus didorong oleh potensi lokal dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, pentingnya partisipasi masyarakat dalam merancang pembangunan yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, teori Keynesian menyatakan bahwa investasi pemerintah dan swasta dalam perumahan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan, pembangunan dapat memperbesar kesenjangan sosial ekonomi.

Namun, kenaikan harga tanah, biaya hidup, dan tekanan sumber daya akibat pertumbuhan penduduk menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pembangunan kompleks perumahan di Desa Lamawalang tidak hanya menimbulkan perubahan sosial, tetapi juga memberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian lokal. Kehadiran penduduk baru dan aktivitas pembangunan menciptakan peluang ekonomi baru yang sebelumnya tidak ada, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

pertumbuhan ekonomi yang cepat ini disertai dengan risiko ekonomi dan ekologi yang mengancam kepunahan dan pemerataan. Dampak paling negatif yang paling krusial adalah kenaikan harga tanah yang tajam akibat tingginya permintaan dari pengembang dan spekulan, yang secara langsung berpotensi mendorong daya beli dan kemampuan masyarakat rendah untuk membeli atau mengembangkan properti di wilayah mereka sendiri. Kenaikan harga tanah ini, bersamaan dengan peningkatan biaya hidup akibat inflasi dari populasi baru, risiko besar memperbesar kesenjangan ekonomi sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan yang tepat.

Lebih lanjut, pertumbuhan populasi yang cepat ini menimbulkan tekanan Malthus pada sumber daya lokal dan infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih, listrik, dan daya dukung jalan yang jika tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang baik, dapat melampaui kapasitas desa, menurunkan kualitas hidup, dan mengancam kesejahteraan masyarakat setempat, Teori Malthus relevan dalam konteks pembangunan perumahan, karena pertumbuhan penduduk yang cepat cenderung menimbulkan

tekanan pada sumber daya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akibat kedatangan penghuni baru tidak hanya memengaruhi aspek sosial, tetapi juga berdampak langsung pada kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat..

Oleh karena itu, agar dampak positif ekonomi ini dapat bertahan, strategi pembangunan harus inklusif dan fokus pada pemberdayaan lokal dalam usaha masyarakat mikro. Penguatan regulasi tata ruang dan penerapan sistem pengelolaan lingkungan terpadu menjadi kunci untuk memitigasi tekanan Malthusian pada sumber daya. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pengembang merupakan prasyarat mutlak agar pembangunan perumahan ini tidak semata-mata menguntungkan pengembang, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan warga Desa Lamawalang secara adil, menyeluruh, dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologis.

## KESIMPULAN

1. Dampak lingkungan Pembangunan Perumahan Waiwatololong Permai menunjukkan dampak dualistik: lingkungan internal sangat baik dengan infrastruktur yang memadai seperti saluran air, udara selokan, namun terdapat ancaman ekologis serius dari pengelolaan sampah yang belum terintegrasi dengan kebiasaan pembakaran yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengabaikan prinsip keinginan. Risiko ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, yang mengakibatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan urgensi yang mendesak untuk mewujudkan sistem pengelolaan limbah terpadu dan memperkuat fungsi pengawasan sebelum jumlah penghuni bertambah.
2. Dampak sosial Pembangunan perumahan telah berhasil mendorong terbentuknya interaksi sosial yang harmonis di Desa Lamawalang, menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman dan teratur melalui partisipasi aktif masyarakat baru dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, serta sikap keterbukaan dari warga lama. Namun demikian, integrasi sosial tersebut menghadapi tantangan struktural berupa segregasi administratif karena beberapa warga baru belum tercatat secara resmi, serta hambatan geografis yang ditimbulkan oleh jarak fisik perumahan kompleks dari pusat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah desa untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guna menjamin terwujudnya integrasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.
3. Dampak ekonomi Dari sisi ekonomi, Pembangunan perumahan telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan terbukanya lapangan kerja baru melalui pesatnya perkembangan usaha mikro dan kecil (UMK). Dukungan terhadap pertumbuhan ini juga terlihat dari peningkatan Dana Desa yang diperoleh berdasarkan penambahan jumlah penduduk. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi yang pesat ini menghadirkan risiko serius, seperti kenaikan harga tanah dan biaya hidup yang tajam, yang berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat asli. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang inklusif dengan fokus pada pemberdayaan UMK lokal dan penguatan

penataan ruang, serta kolaborasi antar berbagai pihak, guna menjamin kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

#### 4. **Saran**

##### 1. Saran untuk pemerintah, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat regulasi dan pengawasan tata ruang agar pembangunan perumahan sesuai dengan RTRW dan tidak menimbulkan degradasi lingkungan.
- 2) Melakukan pendataan kependudukan secara menyeluruh terhadap penghuni baru untuk memastikan akses mereka terhadap pelayanan publik dan alokasi Dana Desa.
- 3) Membangun sistem pengelolaan sampah dan drainase terpadu yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi pertumbuhan populasi dan volume limbah.
- 4) Fasilitasi integrasi sosial melalui program partisipatif, seperti Musrenbang dan kegiatan desa yang melibatkan warga kompleks.
- 5) Mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan mendukung usaha mikro dan menciptakan ekosistem bisnis yang melibatkan warga lama dan baru.

##### 2. Saran untuk Masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial desa untuk memperkuat solidaritas dan mencegah segregasi sosial.
- 2) Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan bersama, baik di dalam kompleks maupun di area sekitar desa.
- 3) Manfaatkan peluang ekonomi yang muncul, seperti membuka usaha kecil atau menjalin hubungan dengan warga kompleks.
- 4) Membangun komunikasi terbuka antarwarga, agar nilai dan norma sosial dapat beradaptasi secara harmonis.
- 5) Berperan dalam pengawasan pembangunan, dengan menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah.

##### 3. Saran untuk peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengamati dampak jangka panjang pembangunan perumahan terhadap struktur sosial dan ekonomi desa.
- 2) Mengembangkan pendekatan partisipatif dalam penelitian, dengan melibatkan warga sebagai subjek aktif dalam proses analisis dan rekomendasi.
- 3) Menggunakan pemetaan lahan untuk memetakan perubahan penggunaan lahan, distribusi fasilitas, dan potensi konflik spasial.
- 4) Perluas cakupan informan, termasuk pelaku usaha lokal, kelompok rentan, dan generasi muda untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam.
- 5) Analisis kebijakan dengan membandingkan Desa Lamawalang dengan desa lain yang mengalami pembangunan serupa untuk merumuskan model pembangunan perumahan yang berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Ananda, R. (2017). Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5(1), 12-25.
- [2] Erin, M. (2015). Pengaruh Kebijakan Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2(4), 1-10.

- [3] Fatimah, S. (2020). Analisis SWOT dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 4(1), 101-115.
- [4] Indarto, Kukuh Dwi, & Rahayu, Sri. (t.thn.). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang. *Jurnal Geografi*. Diakses dari: [\[https://scholar.google.com/?hl=id\]](https://scholar.google.com/?hl=id)(<https://scholar.google.com/?hl=id>)
- [5] Kasnawi, M.T., & Ramli, M. (2016). Dimensi Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan (Mengutip Budiman). *Jurnal Sosiologi Pembangunan*. Vol. 15(1), 40-55.
- [6] Kasnawi, M.T., So, A. Y., & Ramli, M. (2016). Konsep Pembangunan dan Lingkungan (Mengutip Suwarsono dan So). *Jurnal Kajian Sosial*. Vol. 10(2), 120-135.
- [7] Mulya, Ressa, Rahmadani, S., & Wijaya, W. (t.thn.). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Nagari Salido Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Sosek Pertanian*. Diakses dari: [\[https://scholar.google.com/?hl=id\]](https://scholar.google.com/?hl=id)(<https://scholar.google.com/?hl=id>)
- [8] Pratama, Adhitya, Roychansyah, S., & Hergawati, Y. (t.thn.). Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Pengembangan Perumahan di Kecamatan Baruga, Kendari. *Jurnal Arsitektur*. Diakses dari: [\[https://scholar.google.com/?hl=id\]](https://scholar.google.com/?hl=id)(<https://scholar.google.com/?hl=id>)
- [9] Pratama, B. (2020). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Ekonomi Lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 5(3), 50-65.
- [10] Putriningtyas, I. W. (2018). Efektivitas Program Pemberdayaan Komunitas Miskin. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 1(1), 1-10.
- [11] Sadana, D. (2014). Perbedaan Konsep Perumahan dan Permukiman dalam Kajian Perencanaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 42(3), 200-215.
- [12] Sukarsa, I. W. (2014). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 3(1), 45-56.
- [13] Sumirat, D. (2019). Analisis Dampak Sosial Pembangunan Perumahan. *Jurnal Pembangunan Sosial*. Vol. 7(2), 1-15.
- [14] Tanjung, Muhammad Muflihun. (t.thn.). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah*. Diakses dari: [\[https://scholar.google.com/?hl=id\]](https://scholar.google.com/?hl=id)(<https://scholar.google.com/?hl=id>)
- [15] Tarigan, Ronald Rezeki. (t.thn.). Dampak Pembangunan Perumahan Subsidi Terhadap Masyarakat di Sekitarnya Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses dari: [\[https://scholar.google.com/?hl=id\]](https://scholar.google.com/?hl=id)(<https://scholar.google.com/?hl=id>)
- [16] Budiharjo, Eko. (1998). *Perumahan dan Permukiman Kumuh*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [17] Digidowiseiso, K. (2019). *Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [18] Durkheim, Emile. (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: The Free

- Press.<sup>5</sup>
- [19] Hartono, B. (2011). *Pengantar Teori Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
  - [20] Jhingan, M.L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.<sup>16</sup>
  - [21] Keynes, John Maynard. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan.
  - [22] Malthus, Thomas Robert. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. London: J. Johnson.
  - [23] Marx, Karl. (1867). *Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie*. Hamburg: Verlag Otto Meissner.
  - [24] Muhtadi, Avianto dkk. (2000). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
  - [25] Ricardo, David. (1817). *Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
  - [26] Rodriguez-Pose, A. & Tijmstra, S. (2005). *Local Economic Development: Theory and Practice*. London: Routledge.
  - [27] Salim, Emil. (1982). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
  - [28] Smith, Adam. (1776). *The Wealth of Nations*. New York: Random House.
  - [29] Soemarwoto, Otto. (1980). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
  - [30] Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2015). *Economic Development (Edisi ke-12)*. New York: Pearson.
  - [31] Wesnawa, I.G.A. (2015). *Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
  - [32] World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future (Laporan Brundtland)*. Oxford: Oxford University Press.
  - [33] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - [34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - [35] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  - [36] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  - [37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.<sup>37</sup>
  - [38] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016.
  - [39] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.
  - [40] Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

- Kumuh.<sup>40</sup>
- [41] Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 110 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi.
  - [42] Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*. Jakarta: Bappenas.
  - [43] Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Data Kemiskinan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN